

## BAB II

### KEHIDUPAN MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DI SURAKARTA SEBELUM KERUSUHAN MEI 1998

#### A. Kondisi Geografis Kota Surakarta Tahun 1998

Surakarta merupakan salah satu kota besar yang terletak di sebelah Tenggara Ibukota Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Memiliki luas wilayah 44.04 km<sup>2</sup>. Berbatasan dengan beberapa kabupaten lainnya seperti Kabupaten Boyolali, Karanganyar dan Sukoharjo.<sup>1</sup> Sebagian masyarakat umum menyebut Kota Surakarta sebagai Kota Solo. Nama Solo diambil dari nama tempat bermukimnya pimpinan kuli pelabuhan, yaitu *Ki Soroh Bau* yang berangsur-angsur terjadi perubahan ucapan menjadi *Ki Sala*, yang berada disekitar Bandar Nusupan semasa Kadipaten dan Kerajaan Pajang (1500-1600). Sedangkan nama Surakarta diambil dari nama Kasunanan Surakarta Hadiningrat akibat dari perpindahan Ibukota Kerajaan Mataram Islam yang sebelumnya terletak di Kartasura (Kabupaten Sukoharjo).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Siaksara. *Dispendukcakil.surakarta.go.id* diakses melalui [https://dispendukcakil.surakarta.go.id/pelayanan-kami/pelayanan\\_online/siaksara](https://dispendukcakil.surakarta.go.id/pelayanan-kami/pelayanan_online/siaksara). (diakses pada 19 Mei 2021, Pukul 10.26).

<sup>2</sup> Latar belakang perpindahan Keraton Kesultanan Mataram Islam dilakukan oleh raja Pakubuwana II lantaran keraton Kartasura hancur akibat adanya peperangan dan pemberontakan Komunitas Tionghoa atau yang terkenal dengan nama geger pecinan tahun 1742. Pemberian nama keraton baru merupakan pembalikan dari suku kata nama keraton lama, yaitu Karta-Sura menjadi Sura-Karta. Qomarun dan Budi Prayitno. 2007. "MORFOLOGI KOTA SOLO (TAHUN 1500-2000)". *Dimensi Teknik Arsitektur*. Vol 35. No.1 tahun 2007. Surabaya: Universitas Kristen Petra. Hlm. 81.

Keberadaan Surakarta tidak terlepas dari adanya peristiwa bersejarah penting yaitu Perjanjian Giyanti atau *Palihan Negari*, Perjanjian Giyanti didasarkan pada pandangan para pangeran keraton Surakarta yang bersebrangan dengan Raja Pakubuwana II. Mengingat relasi yang baik terjalin di antara Pakubuwana II dengan Kompeni *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Pangeran Mangkubumi (adik Pakubuwana II) memilih meninggalkan keraton dan bersekutu dengan Raden Mas Said (Keponakan Pakubuwana II dan Pangeran Mangkubumi) untuk melawan Keraton Surakarta dan Kompeni hingga timbulah perang suksesi Jawa III atau sebutan umumnya perang tahta Jawa III.<sup>3</sup>

Pemberontakan besar-besaran yang dilancarkan oleh Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said hingga akhir 1750-an membuat Keraton Surakarta dan Kompeni kewalahan dalam menghadapinya. Di tengah periode

---

<sup>3</sup>Perang suksesi Jawa III disebut juga dengan Perang Mangkubumi (1746-1755), dilatarbelakangi adanya hinaan yang didapat dari Gubernur Jendral Van Imhoff atas diperolehnya sayembara dari Pakubuwana II sebuah tanah di Sokawati seluas 3.000 cacah. Pakubuwana II membuat sebuah sayembara yang intinya mengusir dan menghentikan pemberontakan Raden Mas Said. Pemberontakan Raden Mas Said berunsur dari balas dendamnya terhadap perilaku keraton dan VOC yang telah mengasingkan ayahnya Arya Mangkunegara putra sulung dari Hamengkurat IV (Raja ke-8 Mataram Islam) hingga meninggal di Srilanka. Pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Mas Said mampu menguasai beberapa wilayah Karesidenan Surakarta seperti di Sokawati (sekarang Sragen). Pangeran Mangkubumi berhasil mengusir Raden Mas Said dari Sokawati. Dan berhak mendapatkan tanah Sokawati tersebut. Namun Pangeran Mangkubumi terlibat perselisihan dengan kepala administrasi keraton, Patih Pringgalaya (1742-1755). Yang kemudian dicabutnya tanah Sokawati yang telah dihadikan Pakubuwana II kepada Pangeran Mangkubumi atas jasanya yang telah menindas pemberontakan Raden Mas Said. Selain itu adanya perjanjian-perjanjian antara VOC dengan Pakubuwana II yang menguntungkan pihak kompeni. Dengan kejadian seperti ini yang mendasari perlawanan Pangeran Mangkubumi terhadap Pakubuwana II yang dianggapnya tidak menepati janji dan VOC yang dianggap kurang ajar. Kristina Elis Wijayanti. 2007. "Peranan Sultan Hamengkubuwana I dalam pembentukan Kesultanan Yogyakarta tahun 1755". *Skripsi*. Tidak atau belum diterbitkan. Yogyakarta: USD. Hlm. 6-9.

perang Tahun 1749, Pakubuwana II jatuh sakit dan mengusulkan kepemimpinan kerajaan diserahkan kepada Johan Andries Baron Von Hohendorff, yang merupakan salah satu orang kepercayaan Pakubuwana II.

Sebelum melakukan perjanjian dengan Pakubuwana II, Von Hohendorff juga mengusulkan sebaiknya diresmikan dalam satu kontrak. Ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1749, yang disebutkan dalam kontrak itu Kerajaan Mataram Islam menjadi milik kompeni Belanda sedangkan Raden Mas Said diangkat sebagai Patih Kerajaan. Kerjasama yang baik antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said mampu menumbangkan beberapa wilayah jajaran VOC. Tidak berselang lama pada tanggal 15 Desember 1749, Von Hohendorff mengumumkan pengangkatan putra mahkota penerus Susuhunan Pakubuwana II sebagai Pakubuwana III.

Kekuatan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said mampu membuat VOC tertekan. Hal ini didasarkan pada minimnya pasukan VOC yang telah berguguran di peperangan sebelumnya disertai dana yang semakin menipis. Dengan kondisi yang seperti ini VOC merubah taktik baru, yang sebelumnya hanya mengandalkan dari kekerasan senjata saja. Tentu hal ini tidak sepadan dengan yang mereka lawan, mengingat penyerangan yang dilancarkan oleh Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said dengan taktik perang gerilya sukses memporandakan pertahanan militer VOC. Taktik yang dikenal sebagai "*Devide et Impera*" atau diartikan sebagai politik memecah belah yang

diperuntukan untuk memisahkan antara Pangeran Mangkubumi dengan Raden Mas Said sukses membuat kedua belah pihak berseteru.<sup>4</sup>

Keberhasilan VOC dalam mengadu domba keduanya tentu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak kompeni. Demi mempertahankan wilayah kekuasaan VOC dari kerajaan Mataram Islam dan memperkuat wilayah yang telah dikuasai. VOC mendorong Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said untuk melakukan perundingan dengannya.

Diplomasi antara Pangeran Mangkubumi dan VOC terjalin. Pangeran Mangkubumi meminta sebagian dari tanah Jawa sebagai wilayah kerajaannya. Hanya dengan cara ini pasukan Kompeni bisa mendamaikan Pangeran Mangkubumi. Hingga akhirnya memicu munculnya Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Dengan adanya Perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi dua yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Dengan demikian keraton Surakarta menjadi Ibu Kota Kasunanan Surakarta dan tetap dipimpin oleh Pakubuwana III. Sedangkan Pangeran Mangkubumi pindah ke

---

<sup>4</sup>*Devide et Impera* diperkenalkan pertama kali di Nusantara oleh VOC (*Vereenigde Oost-indische Compagnie*), *Devide et Impera* sangat efektif untuk mencapai sebuah tujuan tertentu tanpa menimbulkan perhatian publik yang luas. Beberapa pola yang diaplikasikan VOC dengan memanfaatkan taktik *Devide et Impera* untuk menyerang Nusantara diantaranya: pendekatan *make friends and create common enemy* atau bila diartikan ialah teman dan menciptakan musuh bersama, manajemen isu, bermain di dua sisi atau istilahnya *win-win solution*, merekrut pemimpin lokal sebagai bagian dari rantai manajemen terbawah diluar struktur perusahaan, pengepungan dan embargo, mengatur terjadinya perang saudara dan yang terakhir adalah *Excessive force* dan *extreme prejudice* dimana taktik ini berbentuk sebuah kekerasan, penyiksaan, hingga melakukan serangan penuh dari pihak kompeni. Taktik *Excessive force* dan *extreme prejudice* merupakan cara terakhir apabila keenam taktik sebelumnya gagal. Dharma Kelana P. 2014. *Devide et Impera: Mengenal Taktik dan Strategi Orang Belanda*. Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh. Hlm.1-5

Yogyakarta dan mendapatkan gelar sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I. dua tahun setelah pasca Perjanjian Giyanti, diadakan perundingan antara pihak VOC dan Kasunanan Surakarta dengan Raden Mas Said dengan terciptanya perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757. Perdamaian diantara kubu Pakubuwana III, Sultan Hamengkubuwana I dan Raden Mas Said sama-sama tercapai. Raden Mas Said mendapatkan beberapa wilayah Surakarta dan merupakan wilayah otonom khusus yang diberi nama Kadipaten Mangkunagaran. dan Raden Mas Said mendapatkan gelar sebagai Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I.

Wilayah di Surakarta pada masa kolonialisme terbagi menjadi tiga pemerintahan, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kadipaten Mangkunagaran, dan Residen Belanda. Kasunanan Surakarta membawahi enam kabupaten, yaitu Surakarta, Kartasura, Klaten, Boyolali, Ampel, Sragen serta satu kawedanan Larangan. Kadipaten Mangkunagaran membawahi tiga kawedanan, yaitu Ibu Kota, Karanganyar dan Wonogiri. Sedangkan Residen Belanda membawahi lima bagian yang berada di Kasunanan dan Mangkunagaran. lalu wilayah Administrasi Belanda berada di sekitar kantor residen, benteng, dan tangsi militer. Sedangkan wilayah administrasi Kasunanan Surakarta terdiri dari lima sub-distrik, yaitu Kota, Laweyan, Pasar Kliwon, Jebres dan Serengan. Adapun wilayah administrasi Mangkunagaran hanya ada satu kawedanan. Kawedanan Salabeting Kitha yang terdiri dari dua sub-distrik, yaitu Kampung Lor (Stabelan, Margareja dan Pasar Legi) dan

Kampung Kidul (Keprabon, Kethelan dan Pethetan).<sup>5</sup> Karesidenan Surakarta yang berluas 6.159,78 Km<sup>2</sup> sampai dengan awal abad ke-20 Kasunanan Surakarta terdiri dari 23 distrik dan 101 *onderdistrik*, yang terbagi menjadi 1.240 Kelurahan, sedangkan Mangkunagaran dibagi menjadi 7 distrik dan 32 *onderdistrik* yang terdiri dari 750 Kelurahan.<sup>6</sup>

Daerah Surakarta menjadi sebuah wilayah di Jawa yang merasakan modernisasi sangat pesat. Kecanggihan era Revolusi Industri 1.0 yang berada di wilayah Eropa dibawa langsung oleh pihak Hindia-belanda untuk perkembangan daerah di Surakarta. Untuk menunjang komoditas perdagangan di daerah Surakarta, jalan di sekitar perkotaan dibangun luas dan baik. Adanya pembangunan jalur transportasi kereta api memberikan dampak positif yang besar bagi perkembangan kota Surakarta menuju era modernisasi. Di masa tersebut kereta api telah merubah penggunaan sumber energi yang sebelumnya menggunakan jasa hewan sekarang beralih ke mesin.<sup>7</sup>

Residen Belanda yang menetap di Surakarta mengakibatkan posisi kompeni menjadi sangat penting. Hal ini memberikan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan Surakarta. Dampak perubahan yang terjadi di antaranya ialah tata pemerintahan, tata kota, gaya arsitektur bangunan di Surakarta serta masuknya kebudayaan barat melalui beberapa tradisi bernuansa

---

<sup>5</sup>Rustopo, *Op. Cit.*, Hlm. 17-18.

<sup>6</sup>Riyadi. 2013. "Modernisasi Kota Surakarta Awal Abad XX". *Jurnal Candi*, Vol. 6 No. 2 tahun 2013. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 6.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

Eropa.<sup>8</sup> Perubahan yang terjadi di Surakarta pada kurun waktu 1900 hingga masa menuju kemerdekaan Indonesia telah dibangunnya berbagai utilitas kota yang modern, adanya jaringan listrik (tahun 1902 oleh *Solosche Electriciteits Maatschappij* atau *S.E.M*), jaringan kereta api dan trem (tahun 1905 oleh *Staats Spoorwagen* atau *S.S* dan *Nederlandsch Indische Spoorwagen* atau *N.I.S*), pembangunan jembatan antar kota yang melintasi Bengawan Solo, yaitu Jembatan Jurug yang menuju Karanganyar dan Jembatan Bacem yang menuju Sukoharjo (tahun 1905), jaringan air bersih (tahun 1926 oleh *N.V Hoogdruk Waterleiding* atau *N.V.H.W*).<sup>9</sup>

Di masa penjajahan Jepang tahun 1942 tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam sistem pemerintahan di Kasunanan Surakarta. Jepang hanya melakukan perubahan yang dianggap perlu di bidang militer.<sup>10</sup> Pada awal pendudukannya di Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan yang pernah dijalankan oleh Hindia-Belanda. Untuk melancarkan arus pemerintahan, Jepang merubah sistem pemerintah feodal. Berdasarkan *UU No.27 tentang perubahan tata pemerintahan daerah* menyatakan bahwa di seluruh Jawa dan

---

<sup>8</sup>Rustopo, *Loc. Cit.*.

<sup>9</sup>Qomarun dan Budi Prayitno. 2007. "MORFOLOGI KOTA SOLO (TAHUN 1500-2000)". *Dimensi Teknik Arsitektur*. Vol 35. No. 1 tahun 2007. Surabaya: Universitas Kristen Petra. Hlm. 83.

<sup>10</sup>Hal ini dilakukan Jepang guna untuk mendidik dan melatih pemuda-pemuda Indonesia di bidang militer. Mengingat situasi di medan perang Asia-Pasifik semakin menyulitkan Jepang. Dari situasi tersebut, jepang melakukan konsolidasi kekuatan dengan menghimpun kekuatan dari kalangan pemuda dan pelajar Indonesia sebagai tenaga potensial yang bisa diikutsertakan dalam pertempuran melawan Sekutu. Fadli, M.Rijal dan Dyah Kumalasari. 2019. "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang". *Sejarah dan Budaya*. Vol 13. No. 2 2019. Malang: Universitas Negeri Malang.

Madura pendudukan Jepang membagi daerah kekuasaan atas *Syuu* (Karesidenan), *Si* (Kotapraja), *Ken* (Kabupaten), *Gun* (Kawedanan), *Son* (Kecamatan), *Ku* (desa), dan daerah kerajaan seperti Surakarta dan Yogyakarta menjadi *kooti* (Sistem Kerajaan).<sup>11</sup>

Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, status daerah kerajaan di Surakarta ditetapkan oleh Presiden sebagai daerah istimewa. Pakubuwana XII dan Mangkunegara VIII ditetapkan sebagai kepala daerah istimewa Surakarta pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh presiden. Dalam waktu bersamaan, dibentuk pula Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pembentukan KNIP hanya sebagai parlemen sementara. KNIP tidak hanya terbatas pada pemerintahan pusat, secara bertahap di beberapa daerah dibentuk juga Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID).<sup>12</sup> Keberadaan KNID menjadi gangguan oleh kalangan keraton baik Kasunanan maupun Mangkunagaran, mengingat birokrasi pribumi yang sebagian besar adalah abdi setia kekuasaan. Raja sebagai pemegang kekuasaan serta jabatan. Disisi lain kaum birokrasi pribumi yang sudah terbiasa dengan kesadaran politik menganggap bahwa proklamasi kemerdekaan tidak memiliki landasan hukum apapun juga dari sistem hukum internasional yang berlaku.

Hal ini bertentangan dengan keinginan para politisi dan pejuang di Surakarta yang menginginkan agar mobilitas politik di Surakarta bersifat secara

---

<sup>11</sup> Riyadi, *Op. Cit.*, hlm. 9.

<sup>12</sup>Tujuan dibentuknya KNID adalah untuk melucuti tentara Jepang dan memindahkan kekuasaan pemerintah Jepang ke tangan KNID. Aditya Wahyu Prabowo. 2010. "Peran Komite Nasional Indonesia (KNID) Surakarta Dalam Pergerakan Politik Di Surakarta Tahun 1945-1946". *Skripsi*. Tidak atau belum diterbitkan. Surakarta: UNS. Hlm. 2.

terbuka dan oportuniste kekuasaan dari beberapa kalangan politisi. Hingga berdiri tiga pemerintahan di Surakarta kala itu, yakni Kasunanan, Mangkunagaran, dan KNID. Bentuk pemerintahan Direktorium yang terdiri dari unsur Kasunanan, Mangkunagaran, dan KNID tidak berjalan, karena Kasunanan dan Mangkunagaran berkeinginan berdiri sendiri (Swapraja).

Keadaan situasi yang seperti ini memicu permasalahan sosial yang sangat serius di Surakarta, yang berakibat munculnya gerakan revolusioner dari beberapa kalangan masyarakat Surakarta. Rakyat sudah tidak percaya kepada pemimpin-pemimpin tradisional dan kekuatan politik yang ingin menggoyangkan pemimpin nasional. Dari sudut pandang rakyat, mereka sudah lelah lantaran dijajah Belanda, diduduki Jepang, didominasi keraton, serta ketidakpedulian keraton terhadap sebuah revolusi.<sup>13</sup>

Perseteruan antara kelompok pro dan anti swapraja terjadi hingga berlarut-larut. Pada akhirnya, tanggal 15 Juli 1946 pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Presiden No.16/SD/1946, yang menyatakan bahwa daerah Surakarta menjadi daerah Karesidenan di provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya peraturan tersebut – secara *de facto* dan *de jure* kekuasaan Kasunanan Surakarta telah runtuh. Pada bulan Agustus 1946 struktur pemerintahan di Karesidenan Surakarta terdiri atas kabupaten, kawedanan dan kelurahan. Karesidenan Surakarta terdiri atas wilayah Keraton Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Wilayah Kasunanan Surakarta mencakup

---

<sup>13</sup>Muhammad Anggie F.P dan Hendri Gunawan. 2019. “Keruntuhan Birokrasi Tradisional di Kasunanan Surakarta”.*Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*. Vol 2. No. 2 tahun 2019. Kalbar: BPNB Kalimantan Barat. Hlm. 195.

Boyolali, Klaten dan Sragen dan Wilayah Mangkunagaran yakni Wonogiri dan Karanganyar. Tahun 1950 wilayah Surakarta mendapatkan tambahan 7 kelurahan yakni Karangasem, Kerten, Jajar, Banyuanyar yang semula masuk Kecamatan Colomadu dan Kadipiro, Mojosongo yang semula masuk Kecamatan Gondangrejo.<sup>14</sup>

Pada tahun 1966 terjadi banjir besar di Surakarta sehingga sebagian wilayah kota Surakarta yang dekat dengan Bengawan Solo tenggelam, hal ini berdampak pada daerah wilayah kota Surakarta bahkan wilayah lain di eks Karesidenan Surakarta. Selain kerugian material, kerugian secara sosial dan ekologis dengan hancurnya lingkungan masyarakat yang terimbas dampak banjir.<sup>15</sup> Pada tahun 1970-an terjadi *boom* industri, limbah industrinya dibuang ke Bengawan Solo, sehingga hal ini memberikan dampak kepada musnahnya berbagai spesies makhluk hidup yang ada di sekitar.

Terjadinya urbanisasi dan industrialisasi di Kota Surakarta tahun 1980-an mengalami *urban sprawl* (pemekaran kota), baik dari sisi utara, timur, selatan dan barat. Hal ini didasarkan pada peningkatan jumlah penduduk di Surakarta. Tercatat tahun 1980 jumlah penduduk yang berada di Surakarta sebanyak 459.257 hingga akhir masa pemerintahan orde baru, jumlah penduduk di Surakarta terus mengalami peningkatan. Total sebanyak 542.832 jumlah penduduk di Surakarta pada tahun 1998. Dengan demikian luas permukiman dan jumlah rumah meningkat pesat. Pembangunan perumahan (*real estate*,

---

<sup>14</sup>Riyadi, *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>15</sup>Ridha Taqobalallah. 2009. "Banjir Bengawan Solo Tahun 1966: Dampak dan Respons Masyarakat Kota Solo ". *Skripsi*. Tidak atau belum diterbitkan. Surakarta: UNS. Hlm. 57.

perumnas, kompleks hunian baru) mulai banyak dijumpai dipinggiran kota Surakarta.<sup>16</sup> Stabilisasi dirasakan keadaan kota Surakarta dari kurun waktu ke waktu, dikarenakan pengelolaan yang baik dari berbagai ranah tertentu. Seperti di sektor sarana dan prasarana transportasi, ekonomi, hingga pariwisata. Keadaan ini hanya bertahan sementara hingga adanya kerusuhan di Surakarta pada bulan Mei 1998 yang menyebabkan beberapa kekacauan. Dampak besar dengan adanya kerusuhan di Surakarta tersebut mengalami keterpurukan khususnya di bidang perekonomian.

## **B. Kehidupan Masyarakat Etnis Tionghoa di Surakarta Menjelang**

### **Kerusuhan Mei 1998**

Kehidupan masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia sudah lama berkembang semenjak Indonesia belum merdeka. Leluhur Tionghoa berasal dari dataran Tiongkok khususnya di wilayah Guangdong, Hokkian, dan Hainan.<sup>17</sup> Etnis Tionghoa di Indonesia merupakan salah satu diaspora yang tampak dari kalangan masyarakat Indonesia kala itu. Keberadaan orang Tionghoa di Indonesia, tercatat pada abad ke-5. Orang tersebut merupakan pendeta Buddha, yang bernama Fan Hsien atau Faxian. Faxian meninggalkan beberapa catatan mengenai negara yang dikunjunginya, termasuk di Nusantara. Catatan yang ditulis Faxian semasa perjalanan di Nusantara ialah tentang dinamika

<sup>16</sup>Panganti Widi Astuti. 2010. "Pengaruh Perkembangan Kota Surakarta Terhadap Permukiman di Kawasan Solobaru". *Skripsi*. Tidak atau belum diterbitkan. Surakarta: UNS. Hlm. 60-91.

<sup>17</sup>Symphony A. C. 2017. "Identitas Budaya Orang Tionghoa Indonesia". *Cakrawala Mandarin*. Vol 1. No. 1 tahun 2017. Batam: Universitas Universal. Hlm. 12.

kehidupan masyarakat kerajaan Tarumanegara. Berdasarkan keterangan Faxian, agama yang berkembang pesat di kerajaan Tarumanegara adalah Brahmanisme beserta kepercayaannya yang menurut Faxian sendiri itu merupakan ajaran yang sesat.<sup>18</sup>

Hal ini diperkuat pula dengan interaksi masyarakat etnis Tionghoa pada masa pemerintahan kerajaan Kutai, Mulawarman. Daerah di sekitar wilayah Kutai kaya akan hasil tambang emas, dengan demikian masyarakat etnis Tionghoa dibutuhkan sebagai pandai emas. Dikarenakan kebutuhan akan pandai emas semakin meningkat, para pekerja pembuat bangunan hingga perdagangan. Mereka bermukim menyebar mulai dari Kutai, Sanggau, Pontianak dan daerah disekitarnya.<sup>19</sup> Disisi lain aktivitas pelayaran lalu lintas di perairan Laut Cina Selatan yang melintasi Ayuttha (Thailand) dan Campa (Kamboja) sudah mulai ramai pada masa tersebut dari Pedagang Asia termasuk juga Cina hingga India.<sup>20</sup> Di situasi seperti ini wilayah Nusantara berada di posisi istimewa. Wilayah perairan di selat Makassar hingga selat Malaka dijadikan sebagai jalur lalu lintas pelayaran mengingat kedudukan geografis Nusantara sangat strategis.

Dari beberapa sumber sejarah mengenai catatan kuno Cina, pada abad ke-5 hingga ke-6 negeri-negeri di Nusantara sudah menjalin hubungan

---

<sup>18</sup> Ivan Taniputera. 2009. *History Of China*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Hlm. 313-314.

<sup>19</sup> Irwanti Said. 2019. "Hubungan Etnis Cina dengan Pribumi (sebuah tinjauan Sosiologis)". *Mimbar Kesejahteraan Sosial*. Vol 2. No.1 tahun 2019. Makassar: UIN Alauddin Makassar. Hlm. 4.

<sup>20</sup> Didik Pradjoko, dan Bambang B.U. 2013. *Atlas Pelabuhan-Pelabuhan Bersejarah Di Indonesia*. Jakarta: Kemendikbud RI. Hlm. 49.

diplomantik dengan Dinasti di Cina. Hal ini didasarkan pada zaman Dinasti Sui yang menyatakan bahwa pada tahun 528 dan 535 datang utusan yang berasal dari Duoluomo.<sup>21</sup> Tidak berselang lama pada tahun 666 hingga 669 utusan Duoluomo datang lagi pada masa Dinasti Tang. Catatan sejarah lainnya dari Dinasti Tang menyebutkan adanya sebuah negeri bernama Holing atau kerajaan Kalingga. Diperkirakan terletak di Jawa Tengah bagian utara.<sup>22</sup> Yijing atau bisa di panggil I Tsing merupakan salah satu biksu terkemuka semasa Dinasti Tang. I Tsing mengunjungi Kantuoli (Sriwijaya) dan mencatat pada tahun 689 dan 692 bahwa daerah kerajaan Sriwijaya merupakan pusat Buddhisme yang termasyhur. I Tsing menyarankan bahwa seseorang yang ingin mempelajari Buddhisme di India, hendaknya belajar dahulu di Sriwijaya selama satu atau dua tahun. Agar lebih memahami kitab-kitab Buddhis yang asli di India.

Pada abad ke-5 masyarakat di Nusantara telah melakukan interaksi perdagangan langsung dengan Cina. Kekayaan sumber daya di Nusantara menyediakan berbagai kebutuhan yang diinginkan orang-orang Cina. Seperti contoh bahan parfum di Nusantara dapat bersaing dengan parfum dari Asia Barat. Demikian pula berbagai jenis rempah-rempah yang bervariasi lambat laun akan memasuki pasar Cina. Ditambah juga seperti hasil kerajinan dan

---

<sup>21</sup>Duoluomo merupakan negeri yang terletak di Jawa bagian barat. Berdasarkan penemuan prasasti di Jawa Barat (Prasasti Ciaruteun, Pasir Koleangkak, dan lain sebagainya) bisa disimpulkan bahwa Duoluomo identik dengan Tarumanegara. Ivan Taniputera. 2009. *History Of China*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Hlm. 382.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 382.

hewan-hewan yang hanya terdapat di Nusantara.<sup>23</sup> Seiring perkembangan banyak Etnis Tionghoa berdatangan dan memilih menetap di Nusantara, termasuk di tanah Jawa. Dikarenakan potensi dan kekayaan yang dimiliki Pulau Jawa lantas membuat masyarakat Etnis Tionghoa memilih untuk tinggal di Nusantara. Tujuan masyarakat Etnis Tionghoa selain berdagang, juga untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Pada tahun 1292 masa Dinasti Yuan di bawah pimpinan Kubilai Khan. Kubilai Khan mengutus beberapa pasukan untuk membalas perbuatan Raja Singasari yang dipimpin oleh Kertanegara. Beberapa utusan Dinasti datang untuk meminta Kerajaan Singasari mengakui kekuasaan Dinasti Yuan. Namun Kertanegara tidak memperdulikan ancaman tersebut. Kubilai Khan mengirim seribu kapal ke pulau Jawa yang berisikan 20.000 prajurit dan mendarat di Tuban tahun 1293.<sup>24</sup> Sebelum balas dendam terlaksana, Kertanegara sudah wafat dibunuh oleh Jayakatwang bupati dari Gelang-gelang. Raden Wijaya menantu dari Kertanegara, mendengar kedatangan Bangsa Mongol Dan memanfaatkan untuk membalas dendam kematian orang tuanya. Raden Wijaya berkoalisi dengan pasukan Kubilai Khan untuk melawan Jayakatwang dengan syarat Raden Wijaya harus tunduk pada bangsa Mongol dan mengakui kekuasaan Dinasti Yuan. Setelah kekalahan Jayakatwang, Raden Wijaya diperkenankan pulang ke Majapahit oleh pihak Mongol guna mempersiapkan upeti bagi Kubilai Khan. Kesempatan ini dipergunakan oleh Raden Wijaya

---

<sup>23</sup>Alan Saputra, Dkk. 2014. "Kerjasama Kerajaan Sriwijaya dengan Dinasti Tang Pada Tahun 683-740 M". *Criksetra*. Vol 3. No. 2 tahun 2014. Palembang: Universitas Sriwijaya. Hlm. 63.

<sup>24</sup> Ivan Taniputera, *op. cit.* Hlm. 458.

untuk membebaskan diri dari bangsa Mongol. Ia menyerang balik beberapa pasukan tentara Mongol yang saat itu dalam keadaan tidak siap.<sup>25</sup> Mereka terpaksa melarikan diri kepantai dan berlayar kembali ke negerinya. Sebagian dari tentara Kubilai Khan tertinggal di Jawa dan terserap menjadi penduduk setempat. Semua kejadian tentang hubungan Cina dan Nusantara terkait adanya komunitas Imigran Cina di Nusantara pada masa itu belum bisa dipastikan atau belum ada catatan sejarah yang konkret.<sup>26</sup>

Pada pertengahan pertama abad ke-15. Kaisar Zhu Di dari Dinasti Ming, megutus armada raksasa untuk mengadakan kunjungan muhibah ke Laut Selatan guna untuk mempererat hubungan yang baik dengan negara-negara lain. Armada tersebut dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho (Sam Po Kong) dibantu oleh Wang Jinghong (Ong King Hong) sebagai deputy Laksamana Cheng Ho.<sup>27</sup> Pelayaran Laksamana Cheng Ho ke Nusantara kerap beberapa kali terjadi. Tercatat pada pelayaran pertama armada Laksamana Cheng Ho tahun 1405 berlayar menuju Indocina, Champa, dan singgah di Palembang. Di pelayaran yang ketiga pada tahun 1412 Laksamana Cheng Ho mengunjungi Sumatera, Jawa, dan Madura. Dan kembali lagi ke Sumatera pada ekspedisi

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 459.

<sup>26</sup>Amri Marzali. 2011. "Pemetaan Sosial-Politik Kelompok Etnik Cina di Indonesia". *MI (Masyarakat Indonesia)*. Vol 37. No. 2 tahun 2011. Jakarta: IPSK-LIPI. Hlm. 53.

<sup>27</sup>Kong Yuanzhi. 2009. *Muslim Tionghoa Cheng Ho (misteri perjalanan muhibah di Nusantara)*. Jakarta: YPOI. Hlm. 61.

misi muhibah kelima pada tahun 1421. Sedangkan ekspedisi pelayaran keenam tahun 1424 masih menuju ke Sumatera.<sup>28</sup>

Berdasarkan catatan sejarah, dua tahun sesudah pelayaran Laksamana Cheng Ho yang pertama di tahun 1407, sudah adanya masyarakat Tionghoa islam di Palembang. Ketika Cheng Ho kembali dari pelayaran yang ketiga, bermunculan bangunan-bangunan masjid di daerah Tuban, Gresik, Mojokerto, Jakarta, Cirebon dan tempat lainnya di seputaran wilayah Jawa. Pada tahun 1430, yaitu satu tahun sebelum pelayaran Cheng Ho yang ketujuh dimulai. Sudah adanya Indikasi interaksi masyarakat Tionghoa dengan pribumi di Tuban, Gresik dan Cirebon.<sup>29</sup> Sesuai dengan catatan Ma Huan, penerjemah resmi yang mendampingi ekspedisi pelayaran Laksamana Cheng Ho. Menyebutkan bahwa penduduk di pantai utara, di kota pelabuhan seperti Gresik, Tuban, Surabaya, dan Canggü (Bali) mayoritasnya merupakan pedagang. Kawasan tersebut banyak dikunjungi oleh pedagang asing dari Arab, India, Asia tenggara dan Tiongkok. Di sana banyak orang Tionghoa dan Arab memilih menetap dan berdagang. Ketika sampai di kota Majapahit diperkirakan sekitar 200-300 keluarga yang menetap. Ma Huan menggolongkan penduduk Jawa kala itu menjadi tiga golongan. Pertama, golongan dari orang Arab kegiatan mereka berdagang dan menetap di Jawa. Kedua, golongan dari orang Tangren atau Tenglang, merujuk pada orang

---

<sup>28</sup> Ivan Taniputera, *Op. Cit.*, hlm. 488.

<sup>29</sup> Kong Yuanzhi, *Op. Cit.*, hlm. 230.

Tionghoa. Mereka melarikan diri dari daerah asalnya dan memilih tinggal di Jawa. Ketiga, golongan dari masyarakat pribumi sendiri.<sup>30</sup>

Perjalanan Cheng Ho ke beberapa negara memberikan manfaat dan keuntungan, termasuk di Nusantara sendiri. Para awak kapal Laksamana Cheng Ho membawa kebudayaan dan kebiasaan sehari-hari, seperti menanam padi, jagung, kelapa, teh, tebu, buah-buahan. serta membuat barang keperluan sehari-hari dengan industri rumah, seperti anyaman bambu, payung, topi, dan peralatan lainnya. Rumah ibadah juga dibangun oleh anak buah Cheng Ho ditempat persinggahan Cheng Ho. Bukan hanya masjid, tetapi Kelenteng juga dibangun untuk anak buah Cheng Ho yang beragama Taois dan Buddhis. Pada masa itu alikuturasi kebudayaan Cina-Jawa dan alikuturasi agama menjadi keragaman yang menyatu secara harmonis.<sup>31</sup>

Pada masa peralihan Dinasti Ming(1368-1644) ke Dinasti Manchuria (1644-1911), jumlah imigran Etnis Tionghoa yang datang ke Nusantara semakin bertambah. Hal ini disebabkan adanya penyerangan bangsa Manchu terhadap orang-orang Dinasti Ming. Sehingga banyak penduduk Tiongkok yang memilih untuk menghindari peperangan dengan cara bermigrasi. Kebanyakan masyarakatnya berasal dari provinsi di Cina Selatan, seperti Provinsi Kwangtung, Fukien, Kwangsi dan Yunan. Para perantau tersebut

---

<sup>30</sup>Risa Herdahita putri, Masyarakat Tionghoa di Majapahit (2020, 25 Januari). *Historia.id* diakses melalui <https://historia.id/kuno/articles/masyarakat-tionghoa-di-majapahit-vqm9B/page/1> , 18 Juni 2021.

<sup>31</sup>Conny Handayani. 2006. “Perayaan Peringatan Kedatangan Bahariwan Cheng Ho dan Perannya Pada Perkembangan Pariwisata di Semarang”.*Humaniora*. Vol 18. No. 3 tahun 2006. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Hlm. 276-277.

memiliki keragaman budaya dan etnik. Masyarakat Etnis Tionghoa di Nusantara sebagian besar berasal dari empat suku besar, yaitu *Hokkien, Hakka, Tiu-Chiu dan Kanton*.<sup>32</sup> Secara berangsur-angsur masyarakat etnis Tionghoa membuat perkampungan pecinan di daerah singgah mereka. namun hal ini belum ada gambaran jelas mengenai bagaimana proses keberlangsungan hidup masyarakat Etnis Tionghoa hingga masa awal kedatangan Bangsa Eropa ke Nusantara. Kedatangan beberapa Bangsa Eropa ke Nusantara pada awalnya hanya sekadar untuk kegiatan perdagangan saja. Namun seiring berjalannya waktu keadaan itu mulai berubah. Dikarenakan tingginya persaingan antar negara kala itu, menyebabkan negara Eropa berusaha untuk menguasai sumber rempah-rempah.<sup>33</sup>

Keberhasilan J.P Coen mengambil alih wilayah Jayakarta dari Kesultanan Banten pada tahun 1619 merupakan langkah awal pemerintah Hindia-Belanda dalam menguasai Nusantara hingga bertahun-tahun. Ketika J.P Coen menjadi Gubernur Jenderal di Batavia, Coen mengizinkan sekitar 350 orang Tionghoa untuk tinggal di perkotaan dan bekerja sebagai pedagang kecil. Secara khusus Coen memberikan izin menetap bagi orang Tionghoa untuk bergerak di bidang perdagangan, industri hingga pertanian. Hal ini diperuntukkan supaya secepat mungkin Batavia menjadi pusat perdagangan terbesar di Hindia-Belanda. Pada masa Kolonialisme Hindia-Belanda imigrasi

---

<sup>32</sup> Ririn Darini. 2008. "Nasionalisme Etnis Tionghoa di Indonesia Tahun 1900-1945". *MOZAIK*. Vol 4. No. 1 tahun 2008. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Hlm. 52.

<sup>33</sup> Ulil Absiroh, Dkk. 2017. "Sejarah Pemahaman 350 Tahun Indonesia di Jajah Belanda". *JOMFKIP*. Vol 4. No.1 tahun 2017. Riau: Universitas Riau. Hlm. 5.

masyarakat Tionghoa ke Nusantara berkembang pesat.<sup>34</sup> Migrasi orang Tionghoa terbagi atas empat pola. *Pertama*, orang Tionghoa sebagai pedagang (*huashang*) yang bertujuan mencari keuntungan. *Kedua*, orang Tionghoa sebagai kuli (*huagong*) yang hanya sebatas sementara, apabila pekerjaan diperkebunan usai maka mereka kembali ketempat asal. *Ketiga*, orang Tionghoa sebagai pendatang (*hoaqiao*) yang mayoritas datang pasca keruntuhan kekaisaran Cina tahun 1912. *Keempat*, orang Tionghoa sebagai pendatang transit (*huayi*) yang hanya datang untuk sementara dan migrasi kedaerah lain meski ada juga yang menetap di Indonesia.<sup>35</sup>

Stigma dan diskriminasi terhadap masyarakat Etnis Tionghoa mulai muncul di era VOC, berawal dengan adanya peristiwa pembantaian penduduk Tionghoa di Batavia pada tahun 1740 atau lebih dikenal dengan nama Geger Pecinan atau Tragedi Angke, lebih dari 10.000 jiwa orang Tionghoa tewas akibat kejadian ini. Hal ini disebabkan oleh buruknya sistem pengelolaan pemerintahan VOC pada saat itu. VOC menempatkan penduduk Tionghoa di luar tembok Kota Batavia yang disebut *ommelanden*, tembok kota tersebut dibangun pada tahun 1650.<sup>36</sup> Pengaruh peristiwa pembantaian terhadap masyarakat Tionghoa di Batavia juga mempengaruhi penduduk etnis Tionghoa yang berada diluar Batavia. Dikarenakan kedudukan masyarakat pribumi dan

<sup>34</sup>Abdullah Dahana. 2001. "Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia". *Wacana*. Vol. 2. No. 1 tahun 2001. Depok: Universitas Indonesia. Hlm. 55.

<sup>35</sup>Yudi Prasetyo. 2013. "Sejarah Komunitas Tionghoa Batavia Tahun 1900-1942". *Genta*, Vol. 2. No. 2 tahun 2013. Sidoarjo: STKIP PGRI Sidoarjo. Hlm. 2-3.

<sup>36</sup>Fokky Fuad. 2013. "Peristiwa Chinesetroubelen di Batavia: Sebuah Tinjauan Sejarah Hukum". *Mimbar Demokrasi*. Vol. 12. No. 2 2013. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta. Hlm. 32.

Etnis Tionghoa berada di bawah kekuasaan Hindia-Belanda, keinginan untuk melakukan pemberontakan gabungan kerap seringkali di rencanakan.<sup>37</sup> Pasca peristiwa pembantaian Tionghoa Tahun 1740, VOC mulai memperketat isolasi pemukiman bagi masyarakat Etnis Tionghoa.<sup>38</sup> Memunculkan kebijakan *Wijkenstelsel* yang diperuntukan terhadap Orang-orang Tionghoa, khususnya di Jawa. Dengan begitu akses relasi antara masyarakat Tionghoa dengan warga Pribumi dibatasi. Bagi penghuni Tionghoa yang melakukan perjalanan lebih dari kebijakan yang ditetapkan *Wijkenstelsel* diharuskan membawa surat keterangan jalan atau disebut *Passenstelsel*.

Peraturan *Wijkenstelsel* dan *Passenstelsel* membatasi ruang gerak orang-orang Tionghoa yang berprofesi sebagai pedagang. Apabila pedagang Tionghoa tidak mendaftarkan diri atau kedatangan tidak membawa kartu *Passenstelsel*, mereka akan dihukum atau denda sebesar 10 Gulden. Peraturan kampung Pecinan benar-benar diperkeras dan diperketat, orang-orang Tionghoa dikumpulkan dalam kampung mereka sendiri begitu juga dengan kelompok masyarakat etnis lainnya. Hal ini dilakukan oleh Hindia-Belanda untuk antisipasi koalisi antara masyarakat Tionghoa dan warga pribumi atau golongan lain guna menentang kebijakan pemerintah Hindia-Belanda. Dengan begitu aturan-aturan tersebut menyebabkan terisolasinya masyarakat Tionghoa

---

<sup>37</sup>Dalam aturan hukum pidana orang Tionghoa statusnya disamakan dengan kaum pribumi (*gelijkgesteld met de Inlanders*). Ririn Darini, *Op. Cit.*, hlm. 54.

<sup>38</sup>Separatisme yang dilakukan oleh kolonialisme Hindia-Belanda pada saat itu dengan mengisolasi antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Penduduk terbagi menjadi tiga golongan. *Pertama*, warga negara kelas satu yang terdiri dari orang Belanda dan bangsa Eropa tertentu. *Kedua*, warga negara kelas dua yang terdiri dari orang India, Arab, Tionghoa dan bangsa Timur asing lainnya. *Ketiga*, warga negara kelas tiga terdiri dari penduduk pribumi. *Ibid.*, hlm. 53-54.

dengan kelompok masyarakat lain.<sup>39</sup> Penyebaran kampung Pecinan di beberapa wilayah Nusantara berkembang secara lokalisasi. Salah satunya kampung Pecinan yang berada di Surakarta, Jawa Tengah. Tempat tinggal orang Tionghoa di Surakarta terletak di Kampung Balong. Kampung yang dibangun sejak zaman kompeni dan berlanjut pada masa kolonial. Diperkirakan orang-orang Tionghoa sudah ada di Surakarta pada tahun 1746.

hal ini didasarkan pada kasus konflik internal Keraton Kasunanan Surakarta dimana raja dan beberapa pengikutnya berkoalisi dengan VOC yang menimbulkan kerenggangan diantara para pembesar keraton, munculnya beberapa pemberontakan dari keraton tidak terlepas dari bantuan pasukan Tionghoa kala itu mengingat kondisi dan situasi orang Tionghoa saat itu juga senasib dengan masyarakat pribumi apalagi diperparah dengan adanya pembantaian di Batavia saat itu. Pasca penghapusan kebijakan Wijkenstelsel dan Passenstelsel, pemukiman orang Tionghoa tidak lagi mengelompok pada suatu tempat atau lokalisasi. Melainkan telah menyebar ke tempat atau lokasi lain. Dengan begitu muncul dinamika pertumbuhan dan penyebaran orang-orang Tionghoa pendatang baru di Surakarta.<sup>40</sup>

Masyarakat Tionghoa di Surakarta pada waktu itu lebih banyak bertempat tinggal disekitar Pasar Gede, Kapanjen dan daerah luar pinggiran jalan raya yang masih lingkup kelurahan Sudiroprajan. Daerah kampung Pecinan tersebut berkembang menjadi daerah pertokoan dan perumahan

---

<sup>39</sup> Sarkawi B. Husain, *Op. Cit.*, hlm. 25.

<sup>40</sup> Rustopo, *Op. Cit.*, hlm. 63-64.

golongan menengah keatas yang dihuni oleh masyarakat Etnis Tionghoa.<sup>41</sup> Berbeda dengan Kampung Balong yang mayoritas penduduknya ialah orang Tionghoa miskin. Kampung Balong berkembang menjadi daerah yang tidak terstruktur. Dikarenakan seimbangya komposisi Tionghoa dan Jawa serta kualitas ekonomi yang rata-rata miskin sehingga mudah melakukan relasi bersama. komunikasi sosial antara masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung Balong dengan masyarakat pribumi mudah terjalin dengan baik. Lambat laun proses pembauran berlangsung secara alami. Termasuk perkawinan silang budaya antara Tionghoa-Jawa yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Oleh karena itu, Kampung Balong tumbuh serta berkembang menjadi perkampungan yang terdiri atas berbagai unsur.<sup>42</sup>

Seiring berjalannya waktu perkumpulan masyarakat Tionghoa di Surakarta membentuk sebuah organisasi sosial kemasyarakatan. organisasi masyarakat tersebut sudah ada sejak tahun 1920-an. Diantaranya, Siang Boe Tjong Hwee, Tiong Hoa Hwee Koan (THHK), Kok Sia Hwee, Kong Tong Hoo, Poen Sing Hwee, Hua Chiao Tsing Nien Hui (HCTNH), Hiang Gie Hwee, Giok Tjong Hwee, Tiong Lian Tjong Hwee, Sam Ban Hien, Hoo Hap, Ping Bin Hak Hauw, Hwa Kiauw Kong Hak, Tay Tong Hwee, Giok Hiong, Kioe Kok Gie Tjien Hwee dan Kok Bin Tong. Tidak ada penjelasan tentang

---

<sup>41</sup> Eka Deasy Widyaningsih. 2007. "Masyarakat "China Balong" Sudiroprajan (Studi Interaksi Sosial Masyarakat China-Jawa di Surakarta pada pertengahan-akhir abad XX)". *Skripsi*. Tidak atau belum diterbitkan. Surakarta: UNS. Hlm. 30.

<sup>42</sup> Rustopo, *Loc. Cit.*.

bidang sosial kemasyarakatan bagaimana yang dijalankan.<sup>43</sup> Sebuah surat kabar Tionghoa Mata Hari terbitan Semarang, tanggal 3 Mei 1936 menjelaskan bahwa banyak sekali perkumpulan masyarakat Tionghoa yang memiliki tujuannya masing-masing. Diantaranya ada perkumpulan kematian, olahraga, musik, dagang, politik, pemuda, kebatinan, dan lain-lain. Perkumpulan tersebut terbentuk atas dasar solidaritas dan memperbanyak hubungan komunikasi agar mereka tidak merasa hidup terpencil.<sup>44</sup>

Masyarakat Tionghoa di Surakarta, juga seperti yang tinggal di kota-kota lain, dibedakan antara Tionghoa peranakan dan Tionghoa Totok. Tercatat pada tahun 1930 jumlah orang-orang Tionghoa peranakan di Karesidenan Surakarta mencapai 17.474 jiwa, sedangkan orang Tionghoa totok hanya berjumlah 3.615 jiwa. Jika di spesifik lebih dalam jumlah perempuan Tionghoa peranakan lebih banyak dengan total 9.255 orang, sedangkan laki-laki Tionghoa peranakan hanya berjumlah 8.219 orang. Hal ini berbanding terbalik dengan Tionghoa Totok yang lebih banyak jumlah laki-lakinya yaitu 3.020 orang, sedangkan perempuan Tionghoa Totok hanya berjumlah 595 orang. Dengan data tersebut

---

<sup>43</sup>“*menjadi Jawa Orang-Orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa*” di antara organisasi sosial yang ada, terdapat dua yang memiliki visi politik yang sejalan dengan organisasi politik *Sinpo* yaitu THHK dan HCTNH. THHK dibentuk pada tanggal 17 Maret 1900 oleh sekelompok pedagang dan jurnalis Tionghoa. Pendirian THHK merupakan sebuah organisasi atau yayasan yang berorientasi pada bidang sosial dan pendidikan. Sama halnya dengan HCTNH yang merupakan organisasi perantaraan masyarakat Tionghoa yang berada di Surakarta. HCTNH merupakan peleburan dari tiga organisasi saat itu, yaitu Chung Shioh (Sekolah Belanda), Hak Sing Hwee (Pemuda pendidikan Tionghoa), dan Shiong Ti Hwee (Pemuda Berazas Netral). HCTNH dibentuk pada tahun 1931, bergerak di beberapa bidang mulai dari olahraga, kesenian, hingga kebudayaan. HCTNH membuka beberapa cabang di wilayah seputaran Jawa lainnya. Rustopo, *ibid.*.

<sup>44</sup>*Ibid.*.

besar kemungkinan banyak laki-laki Tionghoa Totok yang menikah dengan perempuan Tionghoa peranakan ataupun pribumi. Atas dasar lain dikarenakan posisi orang-orang Tionghoa Totok adalah para pendatang baru yang baru sekitar satu-dua generasi, berbeda dengan Tionghoa peranakan yang sudah melebur menjadi satu dengan tanah tempat tinggal mereka.<sup>45</sup>

Pada masa pendudukan Jepang semua partai politik dilarang, termasuk pula organisasi etnis Tionghoa yang berbau politik-sosial. Namun Jepang mengizinkan sekolah yang dikelola oleh Hua-Chiao Tsung-Hui (HCTH), dengan adanya kebijakan ini memicu ketegangan antara orang Tionghoa dan warga pribumi.<sup>46</sup> Kaum Tionghoa khususnya peranakan dianggap sebagai bangsa asing yang hanya menumpang tempat tinggal di tanah Indonesia. Pemerintahan Jepang memberikan sekolah khusus untuk anak-anak Tionghoa peranakan yang dikelola oleh HCTH di bawah pengawasan pemerintahan Jepang. Pada umumnya pendidikan masa pemerintahan Jepang sebenarnya digunakan untuk kepentingan perang maupun untuk melibatkan hasil ekonomi negara Jepang. Baik masyarakat pribumi dan masyarakat Tionghoa juga bernasib sama akan doktrin dari pemerintah Jepang.<sup>47</sup>

Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, setidaknya dapat terjabarkan paham nasionalisme etnis Tionghoa yang sangat tinggi. Terdapat tiga paham nasionalisme yang lahir dari kalangan Etnis Tionghoa di Indonesia saat itu.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 68-69.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>47</sup>Febriyana Susanti dan Retno Winarni. 2013. "Antara Idealisme dan Kenyataan: Kebijakan Pendidikan Tionghoa Peranakan di Surabaya pada Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945". *Publika Budaya*. 2013. Jember: Universitas Jember. Hlm. 4-7.

Masing-masing paham berbeda orientasi politiknya. Pertama, adanya THH yang dibentuk untuk menanamkan dan menumbuhkan kembali rasa nasionalisme Tionghoa peranakan di Indonesia yang sudah mulai melupakan tanah leluhur mereka di Cina. Kedua, berdirinya CHH (Chung Hwa Hui) organisasi politik etnis Tionghoa yang berorientasi pada Hindia-Belanda. CHH didirikan tahun 1928 oleh kaum elite peranakan Tionghoa yang berpendidikan Hindia-Belanda. CHH melihat negara Cina bukan sebagai sumber perlindungan mereka, melainkan Hindia-Belanda adalah pelindung dan tempat bernaung mereka. ketiga, terbentuknya Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada tahun 1932. PTI berkiblat pada Indonesia dan lebih mengidentifikasi diri kepada Indonesia daripada ke negara Cina ataupun Hindia-Belanda. Tujuan PTI tidak lain adalah membantu Indonesia membangun bidang ekonomi, sosial dan politik guna menuju suatu cita-cita dimana rakyat menikmati hak-hak dan kewajiban yang sama.<sup>48</sup>

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, banyak orang-orang Tionghoa yang memilih menjadi warga negara Indonesia (WNI). Hal ini tertuang dalam undang-undang kewarganegaraan tahun 1946 dan 1948.<sup>49</sup> Ada beberapa orang Tionghoa yang memilih menjadi WNI. Namun ada pula beberapa orang Tionghoa yang menolak kewarganegaraan Indonesia. Adanya undang-undang kebangsaan Ching tahun 1909 yang menyebutkan bahwa seluruh orang Tionghoa, di manapun mereka dilahirkan merupakan warga negara Cina. Oleh

<sup>48</sup> Ririn Darini, *Op. Cit.*, hlm. 7-10.

<sup>49</sup>Perpu Undang-undang No. 3 Tahun 1946 berisi tentang warga negara dan penduduk negara. Dan Undang-undang No.11 Tahun 1948 yang berisi tentang memperpanjang lagi waktu untuk mengajukan pernyataan kewarganegaraan negara Indonesia.

sebab itu masyarakat Etnis Tionghoa pada saat itu memiliki dua kewarganegaraan, yang kemudian menjadi masalah serius pada saat itu.<sup>50</sup>

Faktor yang menyebabkan terjadinya asimilasi masyarakat Tionghoa di Surakarta dikarenakan kondisi masyarakat Tionghoa itu sendiri ditengah mayoritas, serta adanya kebijakan pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Awal gerakan asimilasi di kalangan masyarakat Etnis Tionghoa berawal dari masa pemerintahan Soekarno. Muncul pada tahun 1959 bersamaan dengan terjadinya kekacauan yang disebabkan oleh pemberlakuannya larangan terhadap perdagangan secara eceran yang dilakukan orang-orang asing di wilayah pedesaan.<sup>51</sup> Pada tahun 1960 muncul suatu konsep tentang asimilasi yang wajar, yang menekankan sifat sukarela tanpa paksaan. Di tahun 1961 presiden Soekarno tidak membenarkan adanya kebijakan pergantian nama bagi masyarakat etnis Tionghoa Indonesia, menurut Soekarno perubahan identitas

---

<sup>50</sup> Hal ini memunculkan perjanjian dwi kewarganegaraan pada tanggal 22 April 1955. Perjanjian ini dijadikan undang-undang No.2 Tahun 1958. UU No.2 Tahun 1958 mensyaratkan bahwa penolakan kewarganegaraan Cina harus dilakukan di pengadilan Negeri di Indonesia. Atau di kedutaan atau konsulat Indonesia untuk orang Tionghoa yang ada di luar negeri. Dengan maksud untuk mempertahankan kewarganegaraan Indonesia. setiap orang yang memiliki kewarganegaraan ganda sebelum tanggal 20 Januari 1960, harus menolak kewarganegaraan Cina ataupun Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yaitu tanggal 20 Januari 1960 – 20 Januari 1962. Daud Ade Nurcahyo, *Op. Cit.*, hlm. 35-36.

<sup>51</sup> Perpres No.10 Tahun 1959 mengenai tentang larangan bagi usaha pedagang kecil dan eceran yang bersifat asing diluar ibukota Swantatra tingkat I dan II serta Karesidenan. Dalam hal ini yang dimaksud orang asing dalam peraturan ini hanya terbatas pada orang Tionghoa karena dari 86.690 pedagang kecil asing yang terdaftar, 90 persennya adalah orang Tionghoa. Peraturan yang menggusur Tionghoa (2007, 13 Agustus). *Tempo.co* diakses melalui <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/124735/peraturan-yang-menggusur-tionghoa> , 7 Juli 2021.

adalah hak pribadi bagi seseorang dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk pemerintah.<sup>52</sup>

Perubahan kebijakan baru dalam segala bidang terjadi pada masa transisi pemerintahan Soekarno ke Soeharto. Terutama pada permasalahan etnis Tionghoa di Indonesia. Di masa orde baru, asimilasi yang dilakukan berdasarkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu berusaha mewujudkan asimilasi total pada seluruh aspek kehidupan Etnis Tionghoa di Indonesia. Pada tahun 1966, Presiden Soeharto mendukung asimilasi secara total agar orang Tionghoa yang bertempat tinggal di Indonesia mau menjadi WNI seutuhnya dengan melalui pergantian nama dari nama orang Tionghoa menjadi nama orang Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan presiden sebelumnya. Masa orde baru justru menganggap penggantian nama merupakan tindakan simbolik untuk menyatakan bahwa orang Tionghoa di Indonesia benar-benar menjadi bagian dari WNI seutuhnya. Hanya saja tidak semua orang Tionghoa mematuhi serta melaksanakan kebijakan terkait penggantian nama. Namun ada juga yang dapat menerima dan melaksanakan peraturan pemerintah dengan mengganti nama Tionghoa menjadi Indonesia baik secara perorangan, maupun perusahaan.<sup>53</sup>

Adanya kebijakan asimilasi total yang diterapkan pada masa orde baru terhadap orang-orang Tionghoa diharapkan dapat meleburkan kebudayaan, adat istiadat serta ciri-ciri lainnya ke dalam kebhinekaan masyarakat Indonesia.

---

<sup>52</sup> Romadoni Huda F, dkk. 2015. "Asimilasi Budaya Tionghoa dan Budaya Jawa di Surakarta pada Tahun 1966-1998 dan Relevansi bagi pendidikan multikultural". *Candi*. Vol .12. No. 2 tahun 2015. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 43.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menghendaki kesatuan bangsa termasuk juga kesatuan minoritas dan mayoritas. Persatuan ini dapat dicapai dengan jalan asimilasi, sehingga hubungan antara minoritas dan mayoritas dapat dipererat. Dengan demikian akan terciptalah asimilasi ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Pemerintahan Orde Baru pasca terjadinya peristiwa 30 September 1965 memberikan trauma yang mendalam bagi kalangan masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia. Orang-orang keturunan Tionghoa merasa menerima stigma sebagai kelompok yang berkiblat (komunis) ke Cina selama orde baru. Mereka dicurigai telah mendukung politik Kaum Kiri karena RRT (Republik Rakyat Tiongkok) adalah negara Komunis. Terjadi identifikasi yang esensial dan umum antara etnis Tionghoa dan Komunisme.

Pada tanggal 6 Desember 1967 Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres No. 14 Tahun 1967, tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa. Dalam instruksi tersebut ditetapkan bahwa hal yang berbaur dengan upacara agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa hanya dirayakan di lingkungan keluarga serta dalam ruangan tertutup. Inpres ini bertujuan untuk melikuidasi pengaruh seluruh kebudayaan Tionghoa termasuk kepercayaan, tradisi, adat istiadat dan agama.<sup>54</sup> Pada tahun 1967 juga dikeluarkan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No.6 Tahun 1967 yang berisi tentang menetapkan istilah Cina sebagai pengganti Tionghoa dan Tiongkok, dengan alasan mengandung nilai-nilai yang memberi asosiasi-psiko politis yang negatif bagi

---

<sup>54</sup>Daud Ade Nurcahyo, *Op. Cit.*, hlm. 43.

rakyat Indonesia. Kebijakan adanya pergantian nama bagi masyarakat etnis Tionghoa dengan nama orang Indonesia serta pembatasan sosial interaksi masyarakat etnis Tionghoa semakin mengarahkan mereka sebagai etnis yang merasa dibenci serta tidak mendapatkan keadilan yang layak.<sup>55</sup>

Terlepas dari diskriminatif Pemerintah Orde Baru yang semakin menjadi, beberapa dinamika kehidupan masyarakat etnis Tionghoa di Surakarta yang suram. Salah satunya konflik rasial yang kerap sering kali terjadi. pasca peristiwa G30S, di bawah kawalan pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) masyarakat Surakarta menyerang tempat-tempat yang berhubungan dengan PKI dan G30S. Sasaran juga tertuju pada orang Tionghoa. Di tahun 1972 terjadi kerusuhan rasial di Surakarta yang hanya berawal dari masalah sepele. Berawal dari peristiwa pembunuhan tukang becak oleh warga keturunan Arab di Pasar Kliwon. Hal ini terjadi lantaran orang Arab tersebut memberikan upah yang tidak sesuai dengan tarif yang tukang becak inginkan. Akhirnya terjadi perkelahian yang berakhirnya dengan kematian tukang becak. Informasi kematian tukang becak terdengar ke tukang becak se-Surakarta.

---

<sup>55</sup> Keppres No. 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok Jang Menjangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing (“Keppres 240/1967”). Pasal 5 Keppres 240/1967 berbunyi “Khusus terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Asing jang masih memakai nama Cina diandjurkan mengganti nama-namanja dengan nama Indonesia sesuai dengan ketentuan jang berlaku.” Dalam konsiderans mengingat Keppres 240/1967 merujuk antara lain pada Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tentang Peraturan Ganti Nama Bagi WNI yang Memakai Nama Cina. Dan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/ BA.01.2/ 4683/95 tentang pembatasan kegiatan agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina, tanggal 18 November 1978, yang menyatakan hanya membina lima agama di Indonesia yang dianggap paling banyak pengikutnya seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha.

Dengan bergerombol mereka mendatangi lokasi kejadian dan memprotes pelaku pembunuhan. Hingga akhirnya para perkumpulan tukang becak Surakarta dan beberapa masyarakat Surakarta melakukan perusakan dan pembakaran di Pasar Kliwon. Bukan hanya toko-toko milik orang Arab saja. Toko milik orang Tionghoa di Pasar Pon dan Coyudan juga terkena dampaknya.<sup>56</sup>

Pada tahun 1980 pecah lagi kerusuhan yang lebih besar. Kerusuhan ini dilatarbelakangi oleh kejadian tabrakan lalu-lintas di jalan sekitar Warung Pelem pada 19 November 1980, antara pipit (Jawa) pelajar Sekolah Guru Olahraga (korban) dan kicak, seorang pemuda Tionghoa. Kemudian disusul dengan pemukulan pipit oleh kicak. Tanggal 20 Nopember 1980, Pipit mengumpulkan teman-teman sekolahnya. Sekitar 50 orang siswa bergerak menuju Jalan Urip Sumoharjo untuk mengadakan aksi demonstrasi. Sambil meneriakkan yel-yel untuk menyerahkan pelaku. Peristiwa ini dengan cepat berkembang menjadi kerusuhan massal di bagian-bagian Kota Surakarta yang terdapat pertokoan milik orang-orang Tionghoa. Massa selain merusak dan membakar toko-toko, juga menjarah semua isinya. Aksi anarkis yang berlangsung selama beberapa hari lamanya, dimulai daerah Coyudan kemudian menjalar ke daerah-daerah lainnya dan ditunggangi para “gali” (gang anak liar) yang menjarah toko-toko tersebut. Dengan cepat kerusuhan menjalar ke

---

<sup>56</sup> Rustopo, *Op. Cit.*, hlm. 100.

Boyolali, Salatiga, Ambarawa, Banyubiru, Candi dan Semarang. Di kota ini para perusuh melempari semua rumah dan toko milik Tionghoa.<sup>57</sup>

Selain dilatarbelakangi kasus tabrakan, kerusuhan anti Tionghoa di Surakarta tahun 1980, terfaktor oleh kepentingan ekonomi masyarakat, hubungan antar etnis yang kurang harmonis, juga adanya dendam preman Tionghoa dengan preman pribumi. Faktor penanganan sosial-budaya secara persuasif terhadap masyarakat tidak dijalankan oleh pemerintahan kota maupun aparat kepolisian, sehingga konflik seperti ini tetap menjadi bahaya *latent*. Seperti halnya kerusuhan anti Tionghoa pada bulan mei 1998 dimana masyarakat etnis Tionghoa di Surakarta mengalami penderitaan hingga banyak yang menjadi korban.<sup>58</sup>

### **C. Kondisi Ekonomi Masyarakat Etnis Tionghoa di Surakarta Sebelum Tahun 1998**

Sejak tahun 1890-an orang-orang Tionghoa berperan dalam industri batik, yang semula hanya berkembang dilingkup istana dan rumah para bangsawan. Lambat laun berkembang menjangkau pangsa elemen masyarakat kecil. Selain itu masyarakat Tionghoa juga menguasai perdagangan berbagai jenis bahan baku pembuatan batik, perdagangan bara dan kayu bakar, perdagangan bahan pewarna serta kain mori. Pada awal abad ke-20 orang-orang Tionghoa di

---

<sup>57</sup> Yahya Aryanto P, dkk. 2017. "Konflik Rasial antara Etnis Tionghoa dengan Pribumi Jawa di Surakarta tahun 1972-1998". *JIH*. Vol. 6. No. 1 tahun 2017. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Hlm. 70.

<sup>58</sup> Rustopo, *Op. Cit.*, hlm. 101.

Surakarta membentuk sebuah perkumpulan dagang yang diberi nama *Kong Sing*.<sup>59</sup>

Sejak ditemukannya metode batik cap dan bahan pewarna kimiawi, para Pedagang Tionghoa di Surakarta mengalami kemajuan, terutama dalam hal industri batik. Aktivitas perdagangan lainnya yang tidak kalah penting adalah bidang opium dan pegadaian. Namun perdagangan opium ditiadakan oleh pemerintah pada tahun 1898 dan bidang pegadaian yang diambil alih oleh pemerintah pada tahun 1903. Sedangkan perdagangan kain tekstil di Surakarta saat itu hampir sebagian besar dikuasai masyarakat Tionghoa. 320 dikuasai Tionghoa Totok dan 144 dikuasai Tionghoa Peranakan. Selain itu perdagangan seperti toko kelontong, penjaja keliling hingga perkreditan juga hampir sebagian besar dikuasai masyarakat Etnis Tionghoa. Sejak tahun 1905 orang Tionghoa mulai bergerak di bidang penerbitan dengan membuat perusahaan penerbitan surat kabar. Pada tahun 1907 sudah terdapat 5 perusahaan penerbitan hingga berkembang menjadi 15 pada tahun 1911. Di tahun 1909 di

---

<sup>59</sup>Kong Sing mempunyai anggota yang terdiri atas dua golongan yaitu golongan bangsa Jawa dan golongan bangsa Tionghoa. Kerja sama diantara kedua belah pihak berjalan dengan baik, terutama dalam melakukan pembelian dan penjualan bahan-bahan batik serta untuk melakukan kerukunan dalam urusan kematian. Tidak bertahan lama Kong Sing terjadi perpecahan dikarenakan sikap Tionghoa yang jumawa karena keberhasilan Revolusi Cina serta lahirnya pemerintahan Republik dibawah pimpinan Dr. Sun Yat-Sen. Dari beberapa anggota Kong Sing termasuk mayoritas orang Jawa beranggapan bahwa keluar dari Kong Sing adalah langkah yang paling tepat. Mereka yang keluar dari Kong Sing membentuk perkumpulan yang diberi nama Sarekat Dagang Islam. Novian Dwi Cahyo. 2018. "Peranan H.Samanhudi di Dalam Sarekat Dagang Islam". *Skripsi*. Tidak atau belum diterbitkan. Makassar: UIN AM. Hlm. 27.

Surakarta terbit 4 surat kabar, 3 di antaranya adalah milik orang Tionghoa.<sup>60</sup> Munculnya surat kabar Tionghoa dibedakan menjadi dua jenis, yang pertama pers berbahasa Cina dan kedua pers berbahasa melayu. Hanya saja surat kabar berbahasa Cina lebih sepi peminat, hal ini dikarenakan banyak orang Tionghoa peranakan yang tidak terlalu menguasai bahasa leluhur mereka, sehingga mereka memilih bahasa melayu sebagai sumber informasi masyarakat Tionghoa. Oleh karena itu perkembangan surat berbahasa melayu lebih baik dibandingkan dengan yang berbahasa Cina.<sup>61</sup>

Pada tahun 1920 terjadi resesi ekonomi, puncaknya pada tahun 1930 terjadi depresi ekonomi di Hindia-Belanda.<sup>62</sup> Bagi masyarakat etnis Tionghoa yang berprofesi di bidang perdagangan mulai terganggu, kebanyakan dari mereka bekerja di bidang sektor perdagangan perantara distribusi. Pada masa tersebut keadaan sulit menimpa para pedagang perantara orang Tionghoa

<sup>60</sup>Benny Juwono. 1999. "Etnis Cina di Surakarta 1890-1927: Tinjauan sosial Ekonomi". *Lembaran Sejarah*. Vol .2. No. 1 tahun 1999. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Hlm. 69-75.

<sup>61</sup>Raden Adisutantyo Suyohudoyo. 2010. " Hubungan Orang Cina dan Orang Jepang dalam perdagangan di Jawa 1900-1939 Studi Kasus : Kampanye anti Jepang oleh surat kabar *sin po* ". *Skripsi*. Tidak atau belum diterbitkan. Depok: Universitas Indonesia. Hlm. 45-46.

<sup>62</sup>Resesi ekonomi bisa di istilahkan sebagai penurunan roda perekonomian yang disebabkan beberapa aspek tertentu. Sedangkan depresi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai resesi ekstrem yang berkepanjangan berlangsung selama 3 tahun atau lebih. Pada tahun 1930-an terjadi permasalahan yang sulit di seluruh dunia dan Hindia-Belanda, terutama pada industri perdagangan ekspor. Terjadinya perubahan harga komoditi perdagangan di pasar dunia yang merosot tajam demikian pula permintaannya. Dengan demikian, jumlah keseluruhan nilai ekspor dari tanah jajahan menurun. Hal itu menimbulkan kesulitan ekonomi yang berat di seluruh daerah jajahan, banyak dari beberapa perusahaan yang bangkrut. Soegijanto Padmo. 1991. "Depresi 1930-an dan Dampaknya Terhadap Hindia-Belanda". *Humaniora*. No. 2 tahun 1991. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

dikarenakan keadaan persaingan yang meningkat dan harga-harga yang terus turun berimbas kerugian pada pedagang Tionghoa.

Pasca terjadinya depresi ekonomi pada tahun 1930-an, muncul koperasi-koperasi pribumi yang memberikan alternatif baru kepada masyarakat untuk mengatasi keuangan dalam permodalan usaha pada masa depresi ekonomi. Koperasi ini juga menjadi saingan usaha bagi para pedagang Tionghoa yang selama ini pedagang Tionghoa menjadi penyalur bahan-bahan bagi penduduk Pribumi. Munculnya perdagangan terbuka masyarakat Jepang saat itu juga turut menjadi perhatian orang-orang Tionghoa, pasca depresi ekonomi tahun 1930-an perdagangan orang Jepang semakin intensif. Memunculkan persaingan di kedua belah pihak.<sup>63</sup> Pada masa pendudukan Jepang, seperti halnya warga Pribumi, orang-orang Tionghoa pada umumnya. Terkait kontribusi finansial diwajibkan sebagai dana administratif serta menutup biaya pengeluaran militer. Di Jawa tidak ada jumlah spesifik yang ditentukan, akan tetapi berbagai macam pajak dikenakan di sepanjang masa pendudukan Jepang. Salah satu sistem yang diperkenalkan Jepang kala itu adalah *kumiai* (Serikat pekerja atau koperasi). Berbagai jenis usaha memiliki *kumiai* sendiri, seperti perdagangan dan industri sampai transportasi dan pertanian.<sup>64</sup> Kontrol yang dilakukan Jepang terhadap lesunya perekonomian saat itu berpengaruh besar terhadap bisnis orang

---

<sup>63</sup>Raden Adisutantyo Suyohudoyo, *Op. Cit.*, hlm. 38-39.

<sup>64</sup>*Kumiai* adalah sebuah organisasi yang dibentuk atas dasar peraturan pemerintah dan melibatkan seluruh desa. Pendirian dan aturan *Kumiai* di masing-masing Karesidenan berbeda. Hal ini dikarenakan Jepang memberikan mandat kepada pembesar Karesidenan untuk mendirikan *kumiai* di setiap Karesidenan masing-masing sesuai dengan keadaan yang ada pada Karesidenan mereka. Wahyudi. 2010. "Peran *Kumiai* Pada Masa Penjajahan Jepang di Jawa Tahun 1942-1945". *Skripsi*. Tidak atau belum diterbitkan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 64.

Tionghoa secara umum. Muncul beragam bentuk larangan dan pengawasan terhadap sektor perekonomian. Hal ini berimbas sampai setelah kemerdekaan Indonesia, larangan serta pengawasan yang ketat malah menimbulkan perdagangan ilegal di kalangan para pedagang Tionghoa dan khalayak umum.

Pasca kemerdekaan Indonesia, kedudukan ekonomi orang-orang Tionghoa tetap kuat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pribumisme melalui program Benteng (1951-1957) dan peraturan pemerintahan No.10 (PP 10).<sup>65</sup> Program Benteng terdiri dari dua kebijakan. *Pertama*, memberikan hak istimewa kepada importir pribumi. Importir pribumi diberikan kewenangan impor khusus. Selain itu, para importir pribumi juga menerima jatah devisa dengan kurs murah. *Kedua*, kebijakan ekonomi dilakukan dengan pemberian kredit modal pada pengusaha yang selama ini sulit untuk memperoleh pinjaman dari lembaga pendanaan seperti bank. demi untuk melemahkan

---

<sup>65</sup>Melalui kebijakan ekonomi Benteng, pemerintah ingin meningkatkan peran serta masyarakat Indonesia dengan membentuk pengusaha Indonesia (pribumi) yang kuat agar perekonomian Indonesia tidak di dominasi oleh orang asing. Adanya politik terbuka yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia-Belanda menyebabkan adanya penanaman modal asing di Indonesia. Hal ini membuat banyak modal asing bermunculan di tahun 1950-an, pada hakikatnya penanaman modal asing sangat diperlukan, tetapi juga perlu memikirkan kepentingan rakyat Indonesia. Di tahun 1950 Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi liberal, dimana penanaman modal bebas menjadikan produksi bertambah, tetapi tingkat hidup rakyat Indonesia tidak mengalami banyak perubahan. Kelas pengusaha di Indonesia tidak banyak mengalami perkembangan. Kedudukan pengusaha di Indonesia kurang mampu dalam menyusun kekuatan guna untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor tertentu. Seperti SDM yang rendah di kalangan pengusaha Indonesia dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah, serta pengusaha Indonesia kebanyakan merupakan kelanjutan dari pengusaha sebelum perang, seperti pengusaha batik, rokok kretek, karet kopra, bisa dikatakan sebagai pengusaha-pengusaha kecil. Dalam artian pengusaha Indonesia tidak mampu menghadapi kekuatan pengusaha-pengusaha barat yang modalnya besar dan modern. Karena hal itu pengusaha di Indonesia sangat bergantung pada pemerintah. Sukainah. 2016. "Kebijakan Ekonomi Benteng dan Dampaknya di Surabaya Tahun 1950-1955". *Avatara*. Vol 4. No. 3 tahun 2016. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. Hlm. 1233.

kedudukan ekonomi orang-orang Tionghoa dan membantu pedagang masyarakat Indonesia, nyatanya program Benteng tidak bisa bertahan lama.<sup>66</sup> Program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada Bulan April 1950 oleh masa Kabinet Natsir harus terhenti pada masa Kabinet Djuanda. Dikarenakan program tersebut tidak berhasil, bahkan memungkinkan terjadinya kehancuran ekonomi dan ketidakstabilan politik, program Benteng akhirnya diberhentikan.

Pada Bulan November 1959, dikeluarkannya PP No. 10 Tahun 1959 tentang pelarangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing di luar ibukota daerah swatantra tingkat I dan II serta karesidenan. Mewajibkan untuk mengalihkan perusahaan asing kepada WNI sebelum 1 Januari 1960, peraturan ini menyatakan bahwa orang asing masih diperkenankan tinggal didaerah tersebut, kecuali jika komandan militer setempat menetapkan lain dengan alasan keamanan.<sup>67</sup> Dengan adanya kebijakan PP No. 10 Tahun 1959 dimaksudkan untuk menyehatkan

---

<sup>66</sup>Sebelum adanya program benteng. Sudah ada kebijakan moneter, yaitu kebijakan sanering. Kebijakan sanering merupakan tindakan pemerintah dalam memotong daya beli masyarakat melalui pengurangan nilai mata uang. Kebijakan ini pernah ditetapkan pertama kali oleh menteri keuangan Kabinet Hatta II, Syafruddin Prawiranegara. Hingga dikenal dengan istilah “Gunting Syafruddin”. Dimana uang kertas digunting menjadi dua bagian. Satu sebagai pembayaran alat yang sah, satu bagian lain sebagai obligasi negara. Bagi masyarakat etnis Tionghoa adanya sanering membawa beberapa dampak kerugian terutama bagi para pedagang. Seperti harga jual yang murah yang disebabkan mata uang yang dipotong. Berbeda dengan redenominasi, dimana redenominasi lebih mengarah ke penyederhanaan pecahan (denominasi) mata uang tanpa memotong nilai mata uang. Jadi tidak ada kerugian, dikarenakan daya beli tetap sama. Joseph J.A. Turambi. 1999. “Redenominasi dan Sanering Mata Uang Rupiah (IDR): Analisis Komparasi”. *EBBANK*. Vol. 6. No. 1 tahun 2015. Yogyakarta: Universitas Mahakarya Asia. Hlm. 96-98.

<sup>67</sup>Elyas Rochani Indrayanti. 2009. “Perekonomian Etnis Tionghoa di Surakarta Tahun 1959-1974 (Studi Pasca Keluarnya PP No 10 Tahun 1959)”. *Skripsi*. Tidak atau belum diterbitkan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 95.

perekonomian Indonesia. Namun di lain pihak memicu adanya ketegangan diplomatik diantara Indonesia dengan Republik Rakyat Cina. Hal ini berimbas pada perekonomian masyarakat etnis Tionghoa yang mengalami kekangan.

Rezim orde baru memiliki sebuah keinginan untuk memobilisasi serta memanfaatkan modal Etnis Tionghoa WNA dengan memasukkannya dalam kategori modal asing dalam negeri dan menyatakannya sebagai kekayaan nasional termazkur di dalam instruksi Soeharto. Instruksi ini kemudian di klarifikasikan di dalam UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) tahun 1968 yang menyatakan bahwa modal asing dalam negeri memiliki status yang sama dengan modal nasional dan modal negara, dan disebut juga modal dalam negeri. Maka dari itu, Etnis Tionghoa WNA dapat menanamkan modalnya dan mendapat perlakuan yang sama dengan modal WNI dan negara. Modal itu akan diberi keringanan dan pembebasan pajak. Dan yang paling penting modal investasi milik Tionghoa WNA akan diberikan legalisasi apabila diinvestasikan di sektor produksi di luar sektor perdagangan.<sup>68</sup>

Berlakunya pasar bebas pada masa pemerintahan orde baru yang menganut sistem terbuka, sekaligus mengakhiri perlindungan terhadap pengusaha Indonesia. Masuknya bahan dan bumbu batik impor secara bebas, juga tekstil dan produk tekstil, mesin printing, industri substitusi impor pertekstilan yang tanpa kendali, telah menghancurkan industri batik tradisional yang menjadi andalan pengusaha Indonesia. Implikasinya, koperasi-koperasi batik primer juga ambruk. Tahun 1960-an pedagang-pedagang Tionghoa di

---

<sup>68</sup>Guntur Arie Wibowo. 2017. "Ekonomi Etnis Cina di Surakarta selama Orde Baru". *Seuneubok Lada*. Vol. 4. No.1 tahun 2017. Aceh: Universitas Samudra. Hlm. 61.

Kota Surakarta sudah menjalar ke lokasi-lokasi strategis, seperti jalan di sekitar Pasar Legi, sekitar Pasar Gede, hingga sekitar Pasar Singosaren. Selain itu pasar-pasar tradisional lainnya di Surakarta, seperti Pasar Tanggul, Pasar Ledoksari, Pasar Jebres, Pasar Kembang, Pasar Kadipolo, Pasar Nangka, Pasar Harjodaksino, Pasar Kleco, Pasar Kabangan dan Pasar Laweyan. Turut menjadi salah satu prasarana ekonomi yang penting di Surakarta kala itu.<sup>69</sup>

Pada akhir tahun 1960-an terdapat kelangkaan hasil-hasil industri, seperti halnya produk tekstil di Surakarta kurang dari 0,02% untuk periode 1966 hingga 1968, disisi lain menghadapi permintaan yang besar membuat para produsen dalam negeri dapat menjual hasil-hasil produksinya dengan mudah. di tahun 1966-1967 banyak kapasitas di sektor industri yang menganggur, sehingga produksi dapat ditingkatkan dalam jumlah yang cukup besar dan dalam kurun waktu yang singkat. Masuknya investor baik PMA maupun PMDN, memberikan perkembangan signifikan dalam bidang perekonomian.<sup>70</sup>

Tercatat pada tahun 1971 ada 9 perusahaan yang telah melakukan investasi di Surakarta, baik yang memulai investasi baru maupun yang ingin memperbesar skala usahanya. Terdapat 4 PMA yang terdiri dari satu perusahaan tinta cetak, yaitu PT. Menara Dai Kichi dengan kapasitas 240 ton/tahun dan menyediakan lapangan pekerjaan 340 buruh. Satu perusahaan

---

<sup>69</sup>Rustopo, *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>70</sup>PMA merupakan singkatan dari Penanaman Modal Asing. Sesuai dengan UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dimana dalam pasal 1 dijelaskan bahwa PMA di dalam UU ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan UU ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

MSG, yaitu PT. Indo Vitsin dengan kapasitas 100 ton/tahun dengan menyediakan lapangan pekerjaan 127 buruh. Dan dua perusahaan di bidang tekstil yakni PT. Batik Keris dengan kapasitas 1.425.000 m/tahun dengan menyediakan lapangan pekerjaan 130 buruh. Dan PT. Garuda Tex dengan kapasitas 1.485.000 m/tahun dengan menyediakan lapangan 200 buruh.

Kemudian terdapat 5 PMDN yang memperbesar perusahaannya terdiri dari 3 perusahaan tekstil, yaitu PT. Sangidoe yang memiliki 200 alat tenun mesin dengan kapasitas 2.700.000 m/tahun dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 540 buruh. Koperasi Batik Bahari yang memiliki 300 alat tenun mesin dengan kapasitas 2.548.260 m/tahun serta menyediakan pekerjaan bagi 544 buruh. Dan PT. Kasigit Tex memiliki 1000 alat tenun mesin dengan kapasitas 4.275.000 m/tahun serta menyediakan pekerjaan bagi 320 buruh. 2 perusahaan lainnya adalah perusahaan rokok, yaitu PT. Dewan Daru yang memproduksi rokok putih dengan kapasitas 1.058.000.000 batang/tahun dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 130 buruh. Dan pabrik rokok PT. Djitoe yang memproduksi rokok kretek dengan kapasitas 1.058.000.000 batang/tahun yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi 250 buruh.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Guntur Arie Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 64.

PDRB (produk domestik regional bruto) Surakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 1975 tingkat PDRB ADHK mencapai 32.547,768.<sup>72</sup> Di tahun 1980 meningkat menjadi 49.262,675 dan pada tahun 1985 meningkat di angka 261.815,609. Hingga di tahun 1995 mencapai angka 1.166.205,398. Pada tahun berikutnya masih terus mengalami kenaikan angka.<sup>73</sup> Hal ini tidak terlepas dari peran penting elemen masyarakat Surakarta dalam menjalankan sistem perekonomiannya. Pada tahun 1996-1997 terdapat 204 industri pabrikan skala menengah hingga skala besar di kota Surakarta dan sekitarnya, yang terdiri dari 65 pabrik tekstil, 42 pabrik batik dan printing, 28 pabrik makanan, 19 pabrik plastik, 14 pabrik rokok, 12 perbengkelan, 9 pabrik kimia, alkohol, dan cat, 5 pabrik jamu tradisional, 4 perusahaan *real-estate*, 3 agen kayu gelondongan, 2 pabrik logam dan kaca, dan 1 pabrik penyamakan kulit. Dari 65 pabrik tekstil di Surakarta, 38 perusahaan tekstil adalah milik orang-orang Tionghoa, 13 perusahaan milik orang Jawa, 9 perusahaan milik PMA (Hongkong dan Taiwan), dan 5 perusahaan hasil patungan etnis Arab-Tionghoa. Dari 42 perusahaan batik dan

---

<sup>72</sup>PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB disajikan dalam dua aspek. *Pertama*, PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. *Kedua*, PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan melihat perkembangan pendapatan agregat dari tahun ke tahun. Diskominfo dan Persandian Kabupaten Paser. 2019. *Analisis Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Menurut Lapangan Usaha*. Kalimantan Timur: Diskominfo dan persandian Kabupaten Paser . Hlm. 10.

<sup>73</sup> Panganti Widi Astuti, *Op. Cit.*, hlm. 69.

printing, 20 diantaranya merupakan perusahaan milik orang Jawa, 17 perusahaan milik orang Tionghoa, dan sisanya 5 perusahaan dimiliki oleh orang Arab.<sup>74</sup>

Perebutan lahan usaha perdagangan maupun aspek lain di perkotaan terutama di jalan yang strategis kerap terjadi, sama halnya dengan suatu daerah yang sedang dalam tahap perkembangan industri. Di Surakarta sendiri terdapat banyak jalan strategis. Dengan mengambil daerah-daerah tertentu, maka deskripsi peta kekuatan jaringan bisnis antar etnis di kota Surakarta dapat diambil beberapa kondisi. Hal ini dapat dilihat dari dominasi perdagangan orang Tionghoa dalam menguasai tempat-tempat strategis bagi usahanya. Jalan yang di dominasi oleh pedagang orang Tionghoa ialah jalan Slamet Riyadi, sedangkan jalan-jalan penyangganya meliputi Honggowongso, Gatot Subroto, Yos Sudarso, dr.Rajiman, Veteran, Brigjen Sudiarto, Kapten Mulyadi, Yosodipuro, Gajah Mada, Diponegoro, S.Parman, MT Martadinata, Kol Sutarto, Juanda, Urip sumohardjo, Ir. Sutami dan A. Yani. dari 18 jalan tersebut, terdapat 1.794 tempat usaha. Dimana terdapat 1.125 tempat usaha milik orang Tionghoa, 613 tempat milik orang Jawa, 38 tempat milik orang Arab, 10 tempat milik orang Madura, 5 tempat milik orang Minangkabau, dan 3 tempat milik orang Sunda, India dan Pakistan.<sup>75</sup>

Krisis ekonomi Indonesia yang terjadi pada kurun waktu 1997-1998 memicu kesenjangan diantara masyarakat Indonesia dengan orang-orang

---

<sup>74</sup> Rustopo, *Op. Cit.*, Hlm. 82.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

Tionghoa. Termasuk orang Tionghoa di Surakarta. Pada awal tahun 1998 kondisi perekonomian masyarakat etnis Tionghoa di Surakarta terbilang cukup mapan. Lantas menyebabkan pandangan masyarakat sekitar yang menilai bahwa krisis ekonomi di Indonesia juga disebabkan oleh masyarakat etnis Tionghoa. banyaknya bangunan supermarket, hotel berbintang, rumah sakit bertaraf nasional, gedung perbankan yang megah dan tempat hiburan yang menunjukkan bahwa kota Surakarta sebagai kota perdagangan dan pariwisata serta banyak diminati oleh para investor juga tidak luput dari campur tangan masyarakat etnis Tionghoa.<sup>76</sup>



---

<sup>76</sup>Djoko Santoso. 2008. "Pemulihan Ekonomi Pasca Kerusakan Tahun 1998(Studi Kasus Kota Surakarta)". *Unisia*. Vol. 31. No. 70 tahun 2008. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Hlm. 384.